

S  
336.2407  
Mul  
P  
e-050841  
2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**



**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI DILAKSANAKANNYA  
Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan  
OLEH SEKSI PPh BADAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT**



12679  
12961

**Diajukan Oleh  
AMRINA RAMADANI MULIASARI  
01013130065**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**2005**

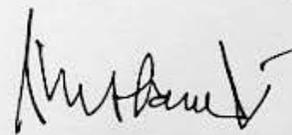
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AMRINA RAMADANI MULIASARI  
NIM : 01013130065  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI  
DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN OLEH SEKSI PAJAK  
PENGHASILAN BADAN KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT

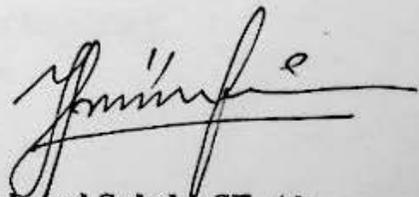
PANITIA PENGAWAS SKRIPSI

Tanggal *3/04/2005* Ketua Panitia



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak  
NIP. 13180164

Tanggal Anggota Panitia



Ahmad Subeki, SE, Ak  
NIP. 132133708

## **Motto :**

**Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka**

**( Ath Thalaaq 2-3 )**

**Cita-cita tanpa usaha adalah sia-sia,  
Perjuangan tanpa pengorbanan adalah mimpi,  
Mimpi menjadi kenyataan adalah suatu kebahagiaan**

**( Ali Sadikin )**

## **Ku Persembahkan Kepada:**

- **Kedua Orang tua (Papa dan Mama Tercinta)**
- **Ayunda Tersayang**
- **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat dan bimbingan-Nyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan baik material maupun spiritual. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

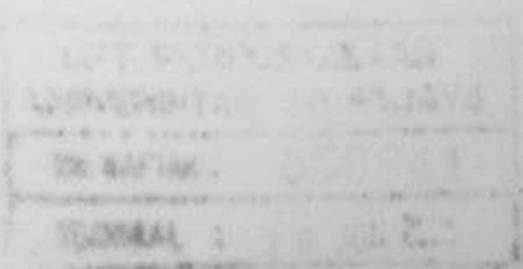
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djakfar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya Indralaya.
2. Bapak Drs.Syamsu Rijal AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Indralaya.
3. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana, MM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Indralaya
4. Ibu Dra.Kencana Dewi, Msc, Ak selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas semua waktu, nasehat dan bimbingan yang telah diberikan.

5. Bapak Drs.Burhanuddin, M.Acc, Ak selaku Pembimbing Skripsi I. Terima kasih atas segala bimbingan dan perhatian yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Subeki, SE, Ak selaku Pembimbing Skripsi II. Terima kasih atas seluruh waktu, pikiran dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Sulaiman S. Manggala, SE, MBA, Ak selaku dosen penguji.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, khususnya di Jurusan Akuntansi.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,.
10. Bapak Kardinan, SE, Ak, Bapak Tresno, SE, Ak, dan Ibu Priyanti, Amd, yang telah membantu dalam memperoleh data di KPP Palembang Ilir Barat.
11. Buat Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Buat Ayunda Nurulfitri Indahsari, SE, Ak, Mbak Renny Miranda dan Henny, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Seluruh sahabat-sahabatku : Handrian, Tri, Tinik, Citra, Elin, Devy, Yanti, Elvi, Elva, Pipit, Ita, Uci, Imel, Winda, Tia, Retno. Terima kasih atas persahabatan indah yang terjalin selama ini.
14. Seluruh sahabat angkatan 2001 Akuntansi dan adik-adik angkatan 2002 yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan dan kita semua. Amin.

Indralaya, Mei 2005

Penulis,



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Sistem Perpajakan Indonesia .....	12
2.2 Pelayanan Perpajakan .....	14
2.3 Mekanisme Pengawasan Perpajakan .....	19
2.4 Ketentuan Umum Pemeriksaan Pajak .....	21
2.4.1 Dasar Hukum Pemeriksaan.....	22
2.4.2 Tujuan Pemeriksaan.....	23
2.4.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	25



2.4.4	Jenis dan Sasaran Pemeriksaan .....	26
2.4.5	Kebijakan Umum Pemeriksaan.....	31
2.4.6	Tahapan Pemeriksaan .....	39
2.4.7	Teknik dan Metode Pemeriksaan.....	40
2.5	Kaitan antara SPT dan Pemeriksaan Pajak.....	42
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM KPP PALEMBANG ILIR BARAT</b>		
3.1	Sejarah Singkat KPP Palembang Ilir Barat .....	47
3.2	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	49
3.3	Prosedur Penerimaan SPT .....	59
3.4	Data dan Fakta .....	65
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Dampak Pelaksanaan <i>Self-Assement System</i> dalam Sistem Perpajakan Indonesia.....	70
4.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Oleh Seksi PPh Badan KPP Palembang Ilir Barat.....	78
4.3	Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari Dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak Oleh Seksi PPh Badan .....	85
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran .....	98
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Krisis multi dimensi yang dialami Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan perekonomian negara hancur. Keadaan ini semakin diperparah setelah pemerintah menetapkan kebijakan untuk tidak lagi meminta dukungan dana dari IMF (*International Monetary Fund*) sehingga tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia semakin berat. Tantangan terberat adalah menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap pemulihan ekonomi guna mendapatkan dukungan fasilitas pembiayaan. Ini mutlak diperlukan mengingat jumlah utang yang jatuh tempo pada 2004 mencapai Rp 1.200 triliun, terdiri dari utang dalam negeri Rp 620 triliun dan utang luar negeri Rp 580 triliun. Sedangkan, bunga yang harus dibayar tahun ini mencapai Rp 60 triliun dan subsidi minyak Rp 65 triliun (Hussein,2004).

Untuk menyukseskan pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran negara termasuk pembayaran cicilan utang tersebut, pemerintah dituntut untuk mencari sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri maupun luar negeri. Namun sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2004, penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mutlak diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran. Caranya adalah dengan mengurangi subsidi dan

pinjaman luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur. Dengan demikian, penerimaan dalam negeri dari sektor pajak menjadi sangat penting dalam APBN kini dan tahun-tahun mendatang. Ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak yang mencapai 70% dalam APBN tahun 2004, yaitu Rp 278 triliun (Yusuf,2004).

Selain sebagai sumber pemasukan utama APBN, pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Begitu besarnya kontribusi pajak dalam APBN, namun realitanya pemungutan pajak oleh pemerintah belum optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung. Aviliani (2003) menyatakan, hal ini tercermin dari masih rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* dalam APBN 2003 yang hanya sebesar 13,1% dan 13,59% yang ditargetkan dapat dicapai dalam APBN 2004. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan *tax ratio* negara-negara lain seperti Jepang (18,6%), AS (19,8%), Malaysia (36,6%), Brunei(18,8%), Thailand(15,8%) ataupun Filipina (16,3%). Itu masih angka tahun 1997 saja. Sedangkan, *tax coverage ratio* sebesar 1:18 yang berarti dari 18 juta wajib pajak yang efektif terjaring hanya satu juta yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini merupakan suatu deviasi yang sangat timpang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan kegiatan manajemen pajak dalam upaya peningkatan *tax ratio* dan penggalan objek pajak baru. Upaya ekstensifikasi pajak bertujuan untuk mengidentifikasi WP baru dengan melalui *canvassing* (penyisiran), kerja sama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah agar setiap keluarga mendapat NPWP, kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian yang mewajibkan pemilik paspor untuk mendapatkan NPWP, kewajiban pemilik kartu kredit untuk memiliki NPWP, dan kewajiban bagi orang pribadi dan badan usaha yang memperoleh penghasilan di atas PTKP untuk menjadi WP. Ekstensifikasi pajak ini perlu dilakukan karena potensi pajak yang sangat besar di Indonesia. Ini terlihat dari jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta jiwa, jumlah WP terdaftar hanya 5.385.491 (WP Badan, WP Pribadi, PPh pasal 21, PPn dan Bendaharawan) (Yusuf,2004).

Bentuk dari pelaksanaan intensifikasi pajak adalah peningkatan kemampuan pemungutan dan pencarian potensi-potensi sumber pajak yang sebelumnya tak terjamah dari WP yang telah terdaftar dengan melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap WP, pembinaan kepada WP, pengawasan administratif, pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum.

Pemeriksaan pajak, yang merupakan suatu bentuk kegiatan intensifikasi pajak, dilakukan terkait dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, yaitu *Self*

*Assesment System*. Sistem ini telah memberi kepercayaan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, serta melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jendral Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap WP dengan melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak penting karena tidak dapat dipungkiri apalagi dengan kondisi negara yang sedang mengalami krisis sekarang ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Banyak WP yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki WP tentang tata cara pengisian format Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang harus mereka isi sehingga petugas pajak tidak dapat mengetahui kebenaran SPT yang disampaikan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak mutlak diperlukan agar WP dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Di samping itu, pemeriksaan pajak bertujuan untuk mencegah rasa ketidakadilan dalam perlakuan pemajakan di antara sesama WP. Singkatnya, pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar WP tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Hardi (2003:3) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh 4 Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3), yaitu : Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Umumnya, pemeriksaan pajak yang dilakukan

oleh KPP adalah Pemeriksaan Sederhana, baik Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) maupun Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Sedangkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit lain selain KPP adalah Pemeriksaan Lengkap (PL).

Salah satu seksi dalam KPP adalah Seksi Pajak Penghasilan Badan. Seksi ini berwenang melakukan pemeriksaan terhadap WP Badan terkait dengan penghasilan yang diperolehnya. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan tersebut menurut ruang lingkupnya termasuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No:KEP-722/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat 'aturan main' internal yang cukup ketat, yaitu pemeriksaan pajak oleh Seksi PPh Badan tidak dapat ditentukan oleh Kepala KPP. Yang menentukan apakah WP tertentu dapat diperiksa oleh Seksi PPh Badan adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Direktur P4 (Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak). Kepala KPP dapat mengusulkan agar WP tertentu diperiksa, namun keputusan atas usulan tersebut sepenuhnya berada pada Kepala Kanwil DJP dan Direktur P4.

Usulan pemeriksaan ke DJP harus disertai alasan (lebih dikenal dengan istilah kriteria pemeriksaan) mengapa pemeriksaan pajak patut dilakukan. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kriteria pemeriksaan pada Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan, telah mendorong dan mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : ” **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH SEKSI PPH BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Salah satu jenis pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KPP Seksi PPh Badan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dimana pemeriksaan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Kepala Kanwil DJP dan Direktur P4. Kebijakan ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak aparat pajak.

Dalam memberikan usulan pemeriksaan, KPP harus menyertai faktor yang menjadi kriteria pemeriksaan sehingga usulan pemeriksaan tersebut dapat diterima. Kriteria tersebut harus sesuai dengan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO: SE-01/PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak. Dari latar belakang di atas, permasalahan yang penulis angkat adalah ” Di antara kriteria pemeriksaan yang ditetapkan dalam SE DirJen Pajak, manakah faktor yang paling dominan menjadi kriteria pemeriksaan? ”

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan menjadi kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila penelitian telah selesai, diharapkan dapat mengembangkan hasil tersebut untuk ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### **a. Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan berupa saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu untuk membantu memberikan penjelasan faktor-faktor apakah yang dapat dijadikan kriteria pemeriksaan dalam pelaksanaan PSL oleh Seksi PPh Badan KPP.

#### **b. Praktis**

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang perpajakan
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah
3. Memberikan informasi pendukung bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

## **1.4 Metodologi Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Barat Seksi PPh Badan. Secara keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi kriteria pemeriksaan dalam pelaksanaan PSL oleh Seksi PPh Badan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO: SE-01/PJ.7/2003. Faktor-faktor yang menjadi kriteria pemeriksaan tersebut adalah :

1. WP Badan menyatakan SPT Tahunan PPh Lebih Bayar (SPT PPh LB)
2. WP Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar (SPT PPh RTLB)
3. WP Badan menyampaikan SPT PPh Rugi yang pelaksanaan pemeriksaan dikaitkan dengan pelaksanaan pemeriksaan rutin untuk tahun pajak lainnya
4. WP Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Kelompok Non-Efektif (NE) 2 tahun berturut-turut
5. WP Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh
6. Data Prioritas
7. Penentuan WP Daerah Terpencil
8. WP Badan mengajukan permohonan cabut NPWP/berubah tempat terdaftar WP dari KPP ke KPP lain

#### **1.4.2 Populasi dan Sampel**

Populasi sasaran sekaligus sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat, selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2002-2004.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang menjadi landasan pembandingan melalui literatur-literatur yang ada baik berupa peraturan perundang-undangan pajak dan peraturan pelaksanaannya, maupun buku-buku bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

Kedua jenis data di atas, dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Melalui wawancara, data dikumpulkan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pejabat atau petugas terkait di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat.

b. Dokumentasi

Melalui dokumentasi, data diperoleh dalam bentuk fotocopy ataupun *print-out* komputer.

#### 1.4.4 Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor yang menjadi kriteria pemeriksaan paling dominan dengan menggunakan tabulasi, sedangkan teknik analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil analisis teknik kuantitatif dengan menggunakan dasar teori yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

#### 1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan ke dalam lima bab dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dijelaskan sistem perpajakan Indonesia, pelayanan perpajakan, mekanisme pengawasan perpajakan, dan ketentuan umum pemeriksaan pajak yang meliputi pengertian

pemeriksaan pajak, dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, jenis dan sasaran pemeriksaan serta tahapan pemeriksaan.

### BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR BARAT

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah, struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur penerimaan SPT Tahunan, data dan fakta.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dampak pelaksanaan *Self Assesment System*, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan analisis faktor-faktor yang mendasari dilaksanakannya pemeriksaan pajak penghasilan oleh Seksi PPh Badan.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang didapat dari hasil analisa pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu juga, penulis akan memberikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran pada Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Aviliani.2003.*Reformasi Aturan Pendukung dan Profesionalitas Aparat Pajak*.(Online).(http://www.klikpajak.com),diakses 8 Desember 2004.
- Boediono.2003.*Pelayanan Prima Perpajakan*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Hardi.2003. *Pemeriksaan Pajak*.Jakarta:Kharisma
- Hidayat.2002.*Menghadapi Pemeriksaan Pajak*.(Online).(http://www.pajak.go.id), diakses 8 Desember 2004
- Kartasmita,Hussein.2004.*Presiden Baru Strategi Pajak Baru*.(Online).(http://www.suamerdeka.com), diakses 8 Desember 2004
- Juanda,I Nyoman. 2003. Peranan Penyuluhan Pajak. (Online).(http://www.klikpajak.com), diakses 10 Maret 2005
- Laksana,Harry Yusuf.2004.*Mengapa laju Penerimaan Pajak Tersendat*.(Online).(http://www.klikpajak.com),diakses 8 Desember 2004.
- Mardiasmo.2003.*Perpajakan*.Yogyakarta:Andi
- Zain,Mohammad.2003.*Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2002*.Bandung: Citra Aditya Bakti